

Urus IPH Lebih Mudah

► **Sebelumnya 2 Minggu,
Kini Cukup Satu Hari**

BATAM, TRIBUN - Urus Izin Per-alihan Hak (IPH) di BP Batam kini lebih mudah. Setidaknya itulah yang dirasakan sejumlah pengem-bang properti di Batam yang terga-bung di DPD Real Estate Indone-sia (REI) Khusus Batam. Jika se-belumnya antrean mengurus IPH bisa memakan waktu 2 minggu, kini cukup satu hari.

Tak hanya itu, penyederhana-an syarat untuk mengurus IPH juga sudah dirasakan pemohon. Dari sebelumnya 17 syarat, kini dipangkas menjadi empat syarat.

"Ya antreannya sudah satu hari sekarang untuk memasukkan berkas. Alhamdulillah bisa lebih cepat," kata Achyar, Sabtu (5/5).



**Untuk syaratnya,
ada syarat paling
dasar dan tambah-an. Tapi tak masa-lah. Jadi satu hari
antrean, dua atau
tiga hari berikutnya
selesai**

ACHYAR ARPAN
Ketua REI Batam

• ke halaman 15



TRIBUN/IST

TANAM POHON - Walikota Batam, Rudi bersama Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menanam pohon dalam gerakan Batam Menanam di Jalan Jenderal Soedirman, Batam, Minggu (6/5).

Penanaman Sejuta Pohon Ketapang Dimulai

► **Pangdam Tanam di Flyover Lualan Madani**

BATAM, TRIBUN - Pencanaan Batam Menanam "Sejuta Pohon Ketapang Kencana" ditandai dengan penanaman bibit Pohon Ketapang Kencana oleh Panglima Kodam I/ Bukit Barisan, Mayjen TNI Ibnu Triwidodo bersama Wali Kota Ba-tam, Muhammad Rudi, Wakil Wali

Kota (Wawako) Batam, Amsakar Achmad, Ketua BP Batam, Mukda Dinarsyah Tuwo, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto serta anggota Fo-rum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di media Jalan Flyover Lualuan Madani, Minggu (6/5). Tak ha-nya unsur pimpinan, personel TNI/

Polri, pegawai Pemerintah Kota Ba-tam, organisasi kemasyarakatan, hingga pelajar pun turut hijaukan jalur antara Flyover Lualan Madani ke Simpang Kepril Mall.

"Penanaman pohon itu merupa-kan gagasan tepat dan harus kita dukung. Ini merupakan gerakan mo-

ral dan kepada seluruh masyarakat, komponen TNI/Polri dari anak-anak sampai dewasa mari kita hijaukan Batam," ajak Pangdam sesaat sebe-lum penekanan sirine tanda dimulainya aksi penanaman pohon.

• ke halaman 15

Urus IPH

Jika dihitung-hitung, waktu memasukkan berkas hingga *decide* oleh *trial* bisa memakan waktu lima hari sekarang. Adapun syaratnya, melampirkan identitas diri seperti KTP pembeli, akta pendirian perusahaan, penetapan lokasi (PL), sertifikat lahan, dan formulir permohonan IPH.

"Untuk syaratnya, ada syarat paling dasar dan tambahan. Tapi tak masalah. Jadi satu hari antrean, dua atau tiga hari berikutnya selesai. Total sekitar lima hari," ujarnya. Menurut Achyar, kemudahan ini sudah dirasakan sejumlah pengembang terdapat 30 April lalu. Beberapa anggotanya di REI sudah

ada yang memasukkan berkas terkait IPH ini dan merasakan kemudahannya.

"Sudah ada beberapa yang masukkan, saya belum monitor berapa banyaknya. Tapi saya percaya urusnya bisa lebih cepat. Kuncinya di *electronic system*," kata Achyar.

Jika perbaikan pelayanan ini bisa dilakukan secara optimal, dia optimistis di hilir nanti tidak terjadi penumpukan berkas lagi seperti beberapa waktu lalu. Sehingga waktu penerbitan IPH jadi lebih cepat, dan berdampak pada bidang-bidang terkait lainnya.

Pelaksana Harian Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Ady Soegiharto menga-

sanggar lainnya yang ada di Batam, Medan dan Jakarta yang turut hadir pada malam itu.

"Intinya acara dinner di ulang tahun organisasi the

takan, saat ini BP Batam terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat. Termasuk untuk urusan IPH.

"Untuk antrean satu hari sudah kita terapkan. Kita menambah konter pelayanan jadi 10 konter. Begitu juga dengan jam pelayanan kita tambah. Sekarang mulai pukul 8.00 hingga pukul 18.00 WIB," kata Ady.

"Selain penambahan konter, persyaratan urus IPH juga dipangkas. Jadi sekarang sudah banyak perbaikan. Kami memang belum secara menyeluruh melakukan sosialisasi. Insha Allah dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi," sambungnya. (wle)

Sambungan Hal.9

dan sanggar busana yang ada di Batam, Medan dan Jakarta.

"Di tengah acara ini, sejumlah sanggar dapat menampilkan penampilan me-

Penanaman Sejuta

Ia mengatakan Batam merupakan andalan dan teras terdepan Indonesia karena letaknya yang berdekatan dengan Negara Singapura. Oleh karena itu Batam tidak boleh kalah dengan negara tetangga. Dan yang bisa membuat Batam maju, baik, serta besar, adalah seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga perlu menata ulang kembali Batam untuk menjadi kota yang modern, sejuk dan hijau. Kebiasaan menanam menurutnya harus dimulai dari sedini mungkin.

Harapannya, penanaman pohon tidak berhenti sampai di penanaman saja tapi tetap dilanjutkan melalui program lain. Misalnya meminta peserta didik baru dari seluruh tingkatan pendidikan untuk menanam di berbagai wilayah Batam. Dimulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, tiap tahun orang yang masuk pendidikan diberikan bibit, agar menanam.

"Mari kita laksanakan gerakan moral untuk menanam, dan menanam. Mulai dari kecil dibiasakan menanam. Lahan kosong dibagi habis. Sehingga lahan kosong di Batam jadi tumbuh hijau dan bagus," katanya semangat.

Pentingnya penghijauan bagi sebuah kota sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kualitas hidup, dimulai dari ketersediaan oksigen yang bagus dan air. Tanpa oksigen dan air, tak ada kehidupan di tempat tersebut.

"Adanya air dan oksigen ini berbanding lurus dengan keberadaan pohon. Sumber daya air jadi kebutuhan, udara bersih jadi kebutuhan. Tidak bisa instan, harus berkelanjutan. Maka setelah menanam ini, mari kita pelihara bersama. Jangan sampai yang satu meranam, yang satu menebang," tuturnya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan

Batam ini sudah didirikan sejak 1974. Desainya saat itu hanya untuk kebutuhan 10.000-an orang. Sejalan dengan perkembangannya, kebutuhan infrastruktur semakin meningkat. Karena itulah Pemko Batam terus bekerja lakukan pembangunan, khususnya pelebaran jalan guna mengatasi kemacetan.

"Batam ini harus kita desain kembali. Apa yang mungkin tidak pas, kita punya kewajiban untuk menatanya. Salah satunya kemacetan. Jalan kita buka. Tidak ada jalan lain, pohon kita potong. Artinya kita punya satu tugas, bagaimana kita menghijaukan kembali Kota Batam secara bersama-sama," kata Rudi.

Tidak berhenti di hari ini saja, penghijauan akan terus dilakukan setiap dua sampai tiga bulan sekali di titik lain Kota Batam. Sehingga pada akhirnya seluruh wilayah Kota Batam menjadi hijau dan nyaman baik bagi warga

Sambungan Hal.9

maupun wisatawan.

Ketua WP Batam, Lakdim Dinar Syah Tuwo mengatakan tujuan menanam pohon ini agar Batam menjadi kota yang indah maju dan modern. Keterseragaman pimpinan daerah bersama Pangdam dalam aksi menanam ini menurutnya tidak boleh berhenti sampai disini dan harus terus berlanjut. "Bukan hanya pimpinan daerah, tapi seluruh elemen masyarakat turut serta melakukan aksi menanam pohon. Bagaimana keinginan itu bisa tumbuh dari sanubari masyarakat," katanya.

Aksi menanam pohon sejuta Pohon Ketapang Kencana dimulai dari simpang Flyover Lahan Madani sampai ke Simpang Kepri Mall. Masing-masing pimpinan OPD beserta staf, TNI/Polri dan masyarakat, pelajar dan anggota Pramuka ambil bagian untuk menanam bibit Pohon Ketapang Kencana di titik yang telah ditentukan. (* / hat)

Warga Hinterland Dilibatkan Pengembangan Wisata

BATAM – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengajak warga hinterland yang tinggal di pulau-pulau penyangga untuk mengembangkan pariwisata demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut dia, potensi pariwisata di pulau-pulau penyangga yang besar harus dimanfaatkan warga supaya peluang itu

tidak diambil orang dari luar daerah setempat. "Karena orang kalau sudah hidup mapan, tidak akan cari liburan yang mewah. Orang luar negeri itu akan berbalik hidupnya pada yang sederhana," kata Rudi, kemarin.

Dia mengatakan banyak yang dapat masyarakat lakukan untuk menarik datangnya wisatawan, di antaranya me-

nyiapkan penginapan layak yang bersih.

Penginapan, kata dia, tidak perlu berbentuk hotel mewah, melainkan hanya dengan rumah tinggal sederhana, seperti yang dilakukan warga di daerah Indonesia bagian timur yang sudah lebih dahulu mengembangkan wisata.

Rudi mengatakan pelancong

utamanya yang berasal dari luar negeri lebih menyukai penginapan yang natural dan sederhana, asalkan nyaman.

"Rumah siapkan seperti ini. Tapi siapkan satu kamar untuk wisatawan. Jadi orang pulau jangan tinggal diam," katanya.

Masyarakat juga harus memanfaatkan berbagai pembangunan infrastruktur yang di-

lakukan pemerintah di pulau, seperti pembangunan jalan dan fasilitas air bersih. Selain untuk dinikmati masyarakat, berbagai pembangunan itu juga untuk memanjakan wisatawan. "Masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari penjualan makanan, oleh-oleh, dan menyiapkan transportasi," ujarnya.

● iwan sahputra

Pemko Didesak Masukkan Prolegda

BATAM KOTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam mendesak Pemko Batam segera memasukan Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2018 yang akan diharmonisasikan. Ada lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas semester satu yang belum dibahas.

"Hingga kini belum ada yang masuk. Paling lambat Juni nan-

ti sudah selesai diharmonisasi," kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho di Batam Centre, Minggu (6/5).

Adapun kelima Ranperda yang diharmonisasi tersebut ialah perubahan Perda No.4/2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan Perda No.6/2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah.

Selanjutnya, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, perubahan atas Perda No.8/2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi tertentu serta perubahan Perda No.12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan. "Seluruhnya adalah pengajuan dari pemerintah daerah. Seharusnya

mereka komitmen dengan apa yang sudah diajukan," katanya.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam Sukaryo menambahkan Pemko Batam harus segera menyelesaikan Perda di luar harmonisasi yang sudah disepakati. Salah satunya yang menjadi prioritas utama 2018 yakni pengelolaan sampah dengan tipping fee yang belum juga dibahas serta belum adanya

pembentukan pansus.

"Seharusnya sesuai aturan Perda, didahului pembicaraan. Namun sejauh ini belum ada arah ke sana," kata Sukaryo.

Sebab sesuai tahapan, lanjut Sukaryo, setelah adanya tahapan pembicaraan, pemko menyurati DPRD Batam dan sekaligus menjadwalkan harmonisasi Ranperda di Rapat Paripurna.

● iwan sahputra